

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI JUMAT
4 AGT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



LAWATAN WAPRES KE SAMARINDA, MOMEN PENTING UNTUK WARGA KALTIM



LAWATAN WAPRES KE SAMARINDA,
MOMEN PENTING UNTUK WARGA KALTIM



LAWATAN WAPRES KE SAMARINDA, MOMEN PENTING UNTUK WARGA KALTIM

SAMARINDA – Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin bersama Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin tiba di Kota Samarinda, Kaltim pada Kamis sore, 3 Agustus 2023. Kedatangan Wapres Ma'ruf Amin menggunakan Pesawat TNI AU A-7308 di Bandara APT Pranoto Samarinda.

Kedatangan Wapres Ma'ruf Amin disambut jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim di Bandara APT Pranoto Samarinda. Dalam acara penyambutan, hadir juga beberapa pejabat tinggi daerah seperti Gubernur Kaltim, Isran Noor, Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto, dan beberapa komandan militer lainnya.

Wapres Ma'ruf Amin mengungkapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan dan mengharapkan kunjungannya ini membawa berkah bagi rakyat Kaltim. Selanjutnya, Wapres Ma'ruf Amin akan menghadiri berbagai agenda selama dua hari di Samarinda.

Jumat 4 Agustus 2023 hari ini, dijadwalkan hadir pada pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS)

Provinsi Kaltim di Komplek Kantor Gubernur. Selain itu, akan ada penyerahan bantuan sosial dari Bank Indonesia kepada Kelompok Usaha Bersama di Kaltim dan bantuan sosial dari PT. Taspen (Persero) kepada 300 ASN Golongan I dan II serta Pensiunan ASN.

Wapres Ma'ruf Amin juga akan berkunjung ke Ponpes Nabil Husein Samarinda untuk bersilaturahmi dan melaksanakan Salat Jumat, serta menyerahkan secara simbolis Bantuan BAZNAS Program Santri Menuju Perguruan Tinggi Negeri.

Sebelum kunjungan ini, Wapres Ma'ruf Amin juga telah melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), di mana dia menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kaltara di Kabupaten Nunukan. Dalam kesempatan itu, Wapres berharap Kaltara menjadi etalase terdepan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Timur Indonesia. **(MK)**



Kantor Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KALTIM CAPAI 810 KASUS

SAMARINDA - Angka pernikahan dini di Kaltim masih saja tinggi. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mencatat kasus pernikahan dini pada 2022 lalu mencapai 810 kasus.

Hal ini disampaikan langsung oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Rumaidi saat bertemu Media Kaltim, Kamis (3/8/2023).

Dia juga menjelaskan, bagi anak yang berusia di bawah 19 tahun maka wajib mengajukan dispensasi jika ingin menikah. "Sesuai dengan UU no 16 tahun 2019 tentang usia nikah, laki-laki dan perempuan di bawah 19 tahun wajib mengajukan dispensasi jika ingin menikah," katanya

Mengenai alasan menikah di bawah umur, Rumaidi tak bisa membeberkan. Pasalnya, data tersebut hanya ada di Pengadilan Agama. "Penjelasan terperinci datanya tidak di kami tapi didinas PA," tukasnya.

Sementara itu, tercatat permintaan dispensasi pernikahan terbanyak terdapat di kabupaten Paser. "Di Satuan Kerja (Satker) Tanah Grogot tercatat 172 dispensasi, itu kasus terbanyak di tahun 2022," katanya.

Diketahui dari data yang kami dapat, jumlah angka pernikahan dini ini terus menurun di Kaltim, tahun 2021 sebanyak 1.089 kasus, 2022 tercatat 810 kasus dan Januari - Juni 2023 tercatat 355 kasus. **(han)**

MKP MEDIA KALTIM PROMOSINDO

Kaltim Fest 2023



EVENT T3RDEPAN MEDIA KALTIM

**RAMAIKAN
& IKUTI
EVENT
NYA
YUK**

15 JULI 2023

BINCANG KOPI

CONVENTION HALL
KALTIM FEST 2023

11-13 AGUSTUS 2023

MINI SOCCER COMPETITION

FATMA MINI SOCCER
TENGGARONG

12-13 AGUSTUS 2023

MEDKAL PES 2023 TOURNAMENT

CLASSIC PLAYSTATION
TENGGARONG

27 AGUSTUS 2023

JALAN SEHAT

AREA PARKIR
GOR SEGIRI SAMARINDA

14 JULI 2023

TALKSHOW
TOURISM GO DIGITAL GO GLOBAL

CONVENTION HALL
KALTIM FEST 2023

JULI-AGUSTUS 2023

LOMBA VIDEO MEdSOS

ONLINE

27 AGUSTUS 2023

GOWES ADVENTURE MERAH PUTIH

AREA PARKIR
GOR SEGIRI SAMARINDA

INFORMASI :

SAMARINDA
+62 821-5783-0863 - 05348943982
BONTANG
+62 811-5405-033 - 082352365484
TENGGARONG
+62 822-5079-0691



Paket **MAKSIMAL** Karyawan

(Makan Siang Hemat Lengkap Untuk Karyawan)

Paket Ber2

Rp **90rb** nett
/pax

Paket Ber3

Rp **130rb** nett
/pax

FREE
Ice Tea

Pilihan 7 Menu Khas Nusantara

- 1 Ikan Dori Saus Telur Asin
- 2 Ikan Dori Asam Manis
- 3 Ayam Geprek Cabe Hijau
- 4 Ayam Bakar Taliwang
- 5 Rendang Daging Padang
- 6 Ikan Nila Masak Tauco
- 7 Ikan Nila Goreng Colo-Colo

FREE

1 pax comp.
Light Meal



20 DUTA WISATA PPU 2023 JALANI KARANTINA, PROSES PEMBEKALAN PROMOSI NUSANTARA



PEMKAB PPU IKUTI PERSIAPAN
VERIFIKASI LAPANGAN
KABUPATEN SEHAT



Pemateri Diskominfo PPU saat menyampaikan pemahaman era digital, Kamis (3/8/2023). (Diskominfo PPU for MediaKaltimGroup)

DESA DIGITAL PPU DAN KKN UNIBA GELAR SOSIALISASI TANGKAL INFORMASI HOAX

PPU - Pemerintah Desa (Pendes) Bukit Raya berkomitmen untuk memberikan wawasan pada warga terkait informasi di media sosial (medsos) dengan memberikan sosialisasi dan edukasi terkait sebagai satu-satunya Desa Digital di Penajam Paser Utara (PPU).

Kegiatan yang digelar Kamis (3/8/2023), merupakan salah satu bentuk kerja sama dengan mahasiswa Universitas Balikpapan (Uniba) yang sedang melaksanakan program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN). Menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU.

Kepala BPD Bukit Raya, Mirwan Kaso menyampaikan kegiatan ini sangat dibutuhkan. Karena saat ini informasi melalui internet dapat diakses dari semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa.

"Mulai dari usia 10 tahun keatas sudah mulai memegang ponsel dan macam-macam informasi yang ada di dalamnya. Oleh kare-

na itu perlu kita menimba ilmu yang sekiranya ada saringan, mana yang hoax dan mana yang benar. Karena, apa yang dibuka semua bisa dilihat. Jadi, penggunaannya harus bisa menyeleksi mana yang sifatnya mendidik dan mana yang tidak," terangnya.

Sekretaris Desa Bukit Raya, Adi Suriyadi menjelaskan adanya kegiatan ini merupakan salah satu dari 20 program kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Uniba. Adanya program kerja ini juga erat kaitannya dengan Desa Bukit Raya sebagai satu-satunya Desa Digital yang ada di dekat Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Masyarakat Kami mayoritas banyak mengakses informasi melalui media sosial dan arus dalam penyebaran informasi itu sangat cepat, itulah mengapa kami sepakat kalau mau mengadakan sosialisasi terkait hoax momennya tepat diadakan di desa kami," jelasnya.

Ia menambahkan, pada era saat ini akses informasi sangat

cepat dan dapat diakses melalui ponsel masing-masing. Maka dari itu sangat penting bagi masyarakat dalam menyikapi dan menyaring kebenaran setiap informasi yang diterima sebelum disebarluaskan melalui media sosial.

"Akses informasi sangat cepat namun filter mereka dalam menyaring informasi ini seperti halnya plong saja, apapun informasi yang masuk, apa yang mereka lihat dan mereka dengar itu adalah informasi yang benar, ini lah yang perlu kita dalami seperti apa cara menyikapinya," ungkap Adi.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial terkait dengan penyebaran berita hoax. "Semoga yang hadir dapat menjadi penyambung lidah kepada masyarakat kita standar-standar apa saja untuk membedakan mana berita yang hoax dan yang tidak," pungkasnya. **(sbk)**



Suasana kegiatan pelaksanaan verifikasi lanjutan penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2023, Kamis, (3/8/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU IKUTI PERSIAPAN VERIFIKASI LAPANGAN KABUPATEN SEHAT

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengikuti kegiatan pelaksanaan verifikasi lanjutan penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2023, Kamis, (3/8/2023). Hal ini sebagai bentuk komitmen tinggi untuk ikut serta menyelamatkan keberlangsungan hidup, menjaga lingkungan dan mengedepankan kesehatan.

Melalui zoom meeting, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemkes) RI, Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota yang telah aktif mendukung terlaksananya verifikasi kabupaten/kota sehat Tahun 2023. Adapun saat ini pihaknya telah sampai pada tahap verifikasi lapangan.

"Dalam hal ini tim verifikasi pu-

sat akan melakukan pendalaman terhadap hasil-hasil kreditasi yang dikirimkan daerah," ujarnya.

Ia berharap seluruh tim di kabupaten/kota dapat memberikan penjelasan sebaik-baiknya. Yakni dengan memberikan data dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

"Hasil verifikasi tersebut nantinya merupakan keputusan sepenuhnya dari tim verifikasi pusat sehingga apapun hasilnya diharapkan dapat diterima dengan lapang dada," ungkap Maxi.

Sesuai dengan peraturan yang ada, dalam penyelenggaraan kabupaten/kota sehat terdiri dari 9 indikator yang perlu dilaksanakan. Yaitu; Tatanan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat; Tatanan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi Sehat; Tatanan Industri dan Perkantoran Sehat; Tatanan Kawasan Pariwisata Se-

hat; Tatanan Pertambangan Sehat; Tatanan Hutan Sehat; Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri; Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi; Tatanan Kehidupan Sosial Yang Sehat.

Sementara itu, Ketua Forum Kabupaten Sehat (FKS) PPU, Satriyani Sirajuddin Hamdam menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh tim verifikasi tingkat nasional. Dia berharap pada tahap pelaksanaan verifikasi di lapangan nantinya kabupaten PPU mampu memenuhi indikator-indikator penilaian yang dibutuhkan.

"Karena sebetulnya Kabupaten PPU melalui forum kabupaten sehat telah berupaya menyampaikan data dukung yang masuk daftar indikator penilaian tersebut. Semoga dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten PPU yang sehat," tutup Satriyani. **(sbk)**



Para finasli Duta Wisata 2023 saat unjuk koreografi, Kamis (3/8/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

20 DUTA WISATA PPU 2023 JALANI KARANTINA, PROSES PEMBEKALAN PROMOSI NUSANTARA

PPU - Calon Duta Wisata Penajam Paser Utara (PPU) 2023 mulai menjalani masa karantina. Mereka ialah 20 muda-mudi Benuo Taka yang bakal menjadi ujung promosi kepariwisataan daerah menyongsong pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebelumnya, pendaftaran Duta Wisata Benuo Taka 2023 ditutup pada 5 Juli lalu. Sebanyak 45 peserta dari seluruh kecamatan di PPU terjaring.

"Tema ajang Duta Wisata 2023 ialah Dharma Nirmala Nusantara. Maksudnya ialah pemuda dan pemudi PPU yang memajukan wisata dan budaya di Nusantara," ujar Ketua Asosiasi Duta Wisata Indonesia (Adwindo) PPU, Sultan Malik, Kamis (3/8/2023).

Lalu, proses pemilihan Duta Wisata memasuki tahap seleksi pada 15 Juli lalu. Seleksi itu meliputi tes kesehatan, tes tulis, dan wawancara.

Terpilihlah 20 besar peserta untuk mengikuti proses selanjutnya yaitu pra karantina. Dalam tahap ini, mereka akan

menjalani masa karantina. Dalam tahap ini, mereka akan diberikan 3 materi penting tentang kepariwisataan.

Materi pertama terkait 'Peran Gen Z dalam Mempromosikan Parekras di IKN Nusantara' yang diberikan oleh Duta Wisata 2015, Andi Putri Restu. Kemudian materi terkait Entrepreneur dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (parekras) oleh Owner Sekar Buen, Sri Wahyuni dan materi personal branding oleh Duta Wisata 2015, Andriyono.

Seleksi dilanjutkan pada 22 Juli yaitu uji penampilan ke sepuluh pasang calon di depan kamera, photoshoot. "Jadi mereka melakukan pengambilan foto mengenakan busana kain dengan latar persawahan," ucapnya.

Dilanjutkan dengan latihan koreografi pada 24 - 31 Juli. Lalu mulai 3 Agustus seluruh peserta akan menjalani masa karantina.

Dalam tahap ini mereka akan mendapatkan pembekalan dan

materi soal parekras dari Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU, Budi. Kemudian juga materi public speaking dari Ketua Yayasan Sانسis Children Sandri Ernarmurti.

Adapun malam grand final pada 5 Agustus 2023 di Pantai Wisata Amal. Sebagai mitra Disbudpar PPU dalam ajang Duta Wisata, Adwindo PPU berharap yang nantinya mereka yang dinobatkan akan dapat membantu pemerintah dalam proses pembangunan.

Lagi-lagi utamanya karena PPU ditunjuk sebagai IKN. Jadi sebagai duta, mereka harus mampu memperkenalkan potensi wisata di PPU.

"Harapan Kami, semoga peserta tahun ini dapat menjalankan tugas mereka dengan baik selama setahun menjabat. Menjadi role model yang siap dan turut membantu promosi pariwisata dan ekonomi kreatif di Nusantara," tutup Malik. **(SBK)**



SEMMI KUKAR DEMO DINKES, SOROTI RANGKAP JABATAN KEPALA DINKES KUKAR

**Kunjungi Kukar, Deputi III
Kemenpora RI Sosialisasikan DBON**





Penyerahan cenderamata dari Asisten III Setkab Kukar, Totok Heru Subroto yang diberikan pada Deputy III Kemenpora, Raden Ismanta (paling kanan). (Ady/Radar Kukar)

Kunjungi Kukar, Deputy III Kemenpora RI Sosialisasikan DBON

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), menerima kunjungan dari Deputy III Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, Raden Ismanta. Kunjungan ini dalam rangka sosialisasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) tahun 2023. Kegiatan ini terpusat di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Kamis (3/8/2023).

Turut hadir, Asisten III, Sekretaris Kabupaten (Setkab) Kukar, Totok Heru Subroto. Kadispora Kukar, Aji Ali Husni dan Ketua KONI Kukar, Rahman. Serta Pengurus Cabang (Pencab) olahraga dan perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Untuk diketahui, DBON merupakan program Pembangunan Olahraga Jangka Panjang 2021-2045. Mencakup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi. Raden menjelaskan bahwa DBON ini bersifat koordinatif, untuk mengakomodir semua potensi yang terkait

dengan pembangunan olahraga.

"Karena pembangunan olahraga tidak sebatas membangun prestasi saja. Tapi membuat bangunan budaya olahraga, membangun karakter bangsa melalui olahraga. Bahkan juga bisa mendorong ekonomi lewat cara olahraga," terang Raden.

Ia menambahkan bahwa, Presiden menginginkan agar visi besar ini bisa dijalankan secara kolaboratif. Dimana terdapat 12 kementerian dan embaga yang akan terlibat menyukseskan visi ini. Termasuk juga pemerintah provinsi (pemprov) dan pemkab.

Dimana untuk memajukan dunia olahraga, tidak hanya bertumpu pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) saja. Tapi juga memerlukan dukungan dan kontribusi aktif dari OPD lain, termasuk juga lembaga-lembaga lainnya. Apalagi DBON sendiri memiliki tujuan besar, yaitu menjadikan Indonesia masuk lima besar dalam Olimpiade tahun 2044.

"Makanya yang hadir pada sosialisasi ini bukan hanya Dis-

pora dan stafnya. Tapi juga ada dinas-dinas lain terkait, ada juga masyarakat dan komunitas, KONI, KORMI, Inorga, guru, kampus, semua. Karena mereka semua punya peran masing-masing, itulah tim koordinasi. Semua komponen itu tadi dijahit menjadi satu kekuatan jangka panjang," paparnya.

DBON sendiri fokus membina 14 cabang olahraga prioritas. Yakni bulutangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, wushu, karate, taekwondo, balap sepeda, atletik, renang, dayung, senam artistik, dan pencak silat.

Asisten III Sekkab Kukar, Totok Heru Subroto, menjelaskan bahwa 14 cabang olahraga yang difokuskan ini merupakan cabang olahraga yang paling berpotensi mendulang prestasi di taraf internasional bagi Indonesia.

"14 Cabang itu tidak saklek, kalau dalam perjalanannya ada yang menurun kemudian ada yang potensial muncul itu bisa masuk. Itu tetap dievaluasi bisa ditambah bisa jadi bisa berkembang masih," kata Totok. **(tabs)**



Suasana aksi di halaman Kantor Dinkes Kukar (Istimewa)

SEMMI KUKAR DEMO DINKES, SOROTI RANGKAP JABATAN KEPALA DINKES KUKAR

TENGGARONG - Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Kutai Kartanegara (SEMMI Kukar), menggelar aksi di halaman Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Kamis (3/8/2023). Dalam aksi ini, SEMMI Kukar menyoroti persoalan rangkap jabatan Kepala Dinkes Kukar, Martina Yulianti, yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Utama (Dirut) RSUD AM Parikesit Kukar.

Ketua SEMMI Kukar, Hasran, menjelaskan bahwa rangkap jabatan sebagai Kepala Dinkes Kukar dan Dirut RSUD AM Parikesit Kukar merupakan hal yang jelas dilarang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang jelas tertuang dalam pasal 12 huruf a yang menyatakan, pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha. Bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Di tambah lagi adanya pelanggaran peraturan Menteri Aparatur Negara nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian pimpinan tinggi. Sesuai aturan jabatan Plt tak bisa lebih dari tiga bulan dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan lagi sebe-

lum masa enam bulan tersebut habis," ungkap Hasran.

Hasran menambahkan, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah. Dinkes Kukar memiliki kewenangan regulator, juga berfungsi sebagai pengatur sistem kesehatan sekaligus sebagai operator pelayanan kesehatan.

"Tentu setiap rumah sakit daerah dibawah koordinasi Dinkes Kukar sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. Maka bagaimana mungkin yang mengawasi dan diawasi adalah orang yang sama," tegasnya.

Selain menyoroti persoalan rangkap jabatan ini, ia juga mengatakan bahwa SEMMI Kukar juga berkomitmen untuk mengawal proses pembangunan dua rumah sakit yang ada di Kukar. Yaitu pembangunan RS Muara Badak yang memiliki anggaran Rp 63 miliar dan pengembangan RSUD AM Parikesit Kukar senilai Rp 164 miliar. Dimana kedua proyek ini ditargetkan rampung dikerjakan pada akhir tahun ini.

"Melihat pembangunan rumah sakit menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di setiap daerah. Juga anggaran yang digelontorkan cukup besar, membuat kita dan terkhu-

sus lembaga yang memiliki wewenang dalam pengawasan. Agar berperan aktif dalam proses pengawasan, agar dalam proses pembangunan tidak terjadi korupsi. Apalagi sampai pembangunannya tidak terselesaikan," pungkasnya.

Usai melakukan aksi di Dinkes Kukar, SEMMI Kukar pun melanjutkan aksi di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar. Adapun dalam aksi ini, SEMMI Kukar menyampaikan beberapa tuntutan yang disampaikan oleh SEMMI Kukar. Diantaranya mencopot kepala Dinkes Kukar dan Dirut RSUD AM Parikesit Kukar, karena telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Kemudian mereka meminta agar segera ganti kepala Dinkes dan Dirut RSUD AM Parikesit Kukar. Meminta rancangan pembangunan dan keuangan pembangunan dan pengembangan RSUD AM Parikesit Kukar dan RS Muara Badak.

Juga meminta agar Kejari Kukar untuk mengawasi pembangunan dan pengembangan kedua RS tersebut. Dan meminta Kejari Kukar untuk memastikan proyek pembangunan dan pengembangan RS ini bisa selesai sesuai perencanaan dan tidak terjadi tindak pidana korupsi. **(tabs)**



TOTAL HADIAH JUARA
BELASAN JUTA!

11-13
AGUSTUS
2023



OPEN TOURNAMENT MINI SOCCER MEDIA KALTIM CUP

WAKTU PENDAFTARAN : 5 JULI - 3 AGUSTUS 2023 (1 BULAN)
TECHNICAL MEETING : 5/6 AGUSTUS 2023

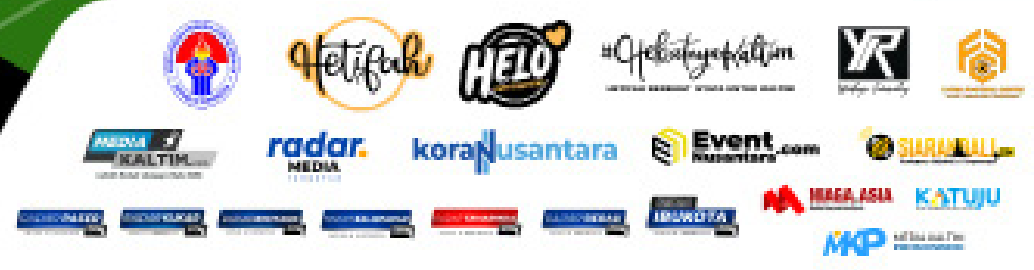
PELAKSANAAN 11-13 AGUSTUS 2023:
1. JAM 08.00-11.00 WITA (PAGI)
2. JAM 15.00-18.00 WITA (SIANG)

LOKASI : LAPANGAN FATMA MINI SOCCER
JALAN PESUT, KELURAHAN TIMBAU TENGGARONG
UANG PENDAFTARAN : RP 1.000.000
KUOTA TERBATAS : 16 TIM
HADIAH : TOTAL HADIAH BELASAN JUTA RUPIAH

JUARA 1 : PIALA + MEDALI + UANG PEMBINAAN
JUARA 2 : PIALA + UANG PEMBINAAN
JUARA 3 : PIALA + UANG PEMBINAAN
BEST PLAYER : PLAKAT + UANG PEMBINAAN
TOP SCORER : PLAKAT + UANG PEMBINAAN
BEST GOALKEEPER : PLAKAT + UANG PEMBINAAN



CONTACT PERSON :
KANG MOEZ :
0822 5576 2256
RAFI' :
0822 5079 0691





GUBERNUR RESMIKAN

BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

BACA HALAMAN A2-A3



ALIANSI BORNEO BERSATU TUNTUT ROCKY GERUNG DIPROSES HUKUM

BACA HALAMAN A5



Resmikan Bantuan Rumah Layak Huni

Gubernur Isran Noor Apresiasi Kepedulian dan Kontribusi Pupuk Kaltim

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) serahkan realisasi bantuan 18 Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga berpenghasilan rendah di Kota Bontang. Penyerahan ditandai peresmian RLH oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, bersama Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim Qomaruzzaman dan Wali Kota Bontang Basri Rase, di Kelurahan Guntung Bontang Utara, Selasa (1/8/2023).

Diungkapkan Qomaruzzaman, bantuan ini wujud kepedulian Pupuk Kaltim sekaligus mendukung program

pemerintah untuk menghadirkan hunian layak dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Hal ini sekaligus bentuk dukungan Pupuk Kaltim terhadap langkah Pemprov Kaltim dalam penyediaan rumah layak huni, melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pada program ini Pupuk Kaltim mengalokasikan bantuan Rp2,07 Miliar, dengan persebaran pembangunan rumah di 15 Kelurahan Kota Bontang sesuai data Pemerintah. Program ini pun sebagai upaya bersama memberikan jaminan hidup dan

kelayakan, sekaligus meningkatkan kualitas serta derajat masyarakat melalui manfaat perusahaan.

"Realisasi bantuan RLH dari Pupuk Kaltim ini wujud dukungan terhadap langkah Pemprov Kaltim dalam penyediaan rumah layak huni melalui program TJSL perusahaan, sebagai bentuk manfaat bagi masyarakat Bontang," ujar Qomaruzzaman.

Dijelaskannya, penyediaan rumah layak huni ini sejalan dengan misi Pupuk Kaltim sekaligus implementasi peran perusahaan sebagai agen pembangunan sesuai amanat Ke-



menterian BUMN. Dimana Pupuk Kaltim sebagai perusahaan yang berdiri dan berkembang di Bontang, wajib memprioritaskan warga Kota Taman untuk alokasi bantuan, dengan realisasi program TJSJ secara terarah dan berkesinambungan.

Dirinya pun berharap, kontribusi Pupuk Kaltim pada program ini turut mendorong peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat, sekaligus upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Kota Bontang.

"Pupuk Kaltim memastikan untuk terus berbuat sekaligus mengambil peran di masyarakat, agar kontribusi dan manfaat perusahaan makin berdampak signifikan terhadap pembangunan di Kalimantan Timur," tambah Qomaruzzaman.

Gubernur Kaltim Isran Noor, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi Pupuk Kaltim yang telah mendukung program Pemerintah untuk memberikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Benua Etam, khususnya

Bontang.

Dikatakan Isran, Pupuk Kaltim merupakan salah satu perusahaan yang sangat berkomitmen membantu Pemprov Kaltim dalam pembangunan daerah, melihat banyaknya realisasi dan kontribusi yang telah direalisasikan.

"Baik di bidang ekonomi maupun pembangunan, Pupuk Kaltim sejauh ini sudah sangat banyak berkontribusi membantu pemerintah. Ini sangat kami apresiasi, dan bantuan rumah layak huni ini salah satu wujud nyata kepedulian Pupuk Kaltim bagi masyarakat," kata Isran.

Isran pun mendorong seluruh perusahaan yang ada di Bontang dan Kalimantan Timur bisa mengikuti langkah Pupuk Kaltim dalam mendukung program pemerintah, dengan pembangunan rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah melalui program CSR perusahaan.

Hal ini melihat tingginya potensi CSR perusahaan yang beroperasi di Kaltim, dan diharap bisa dialokasikan

dengan lebih tepat sasaran dengan memberikan kelayakan hunian guna mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

"Pemprov Kaltim meminta seluruh perusahaan ikut terlibat dan mendukung program ini melalui alokasi CSR untuk memberi manfaat bagi masyarakat," tandas Isran.

Salah satu penerima bantuan RLH Umi Sarah, menyampaikan terima kasih atas kepedulian yang direalisasikan Pupuk Kaltim, sehingga rumahnya yang sebelumnya hangus terbakar bisa kembali berdiri dan layak untuk ditempati. Dirinya menyebut program ini sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Kota Bontang.

"Saya sangat bersyukur dengan adanya program ini. Alhamdulillah rumah kami sudah bisa di tempati dengan layak, semoga yang sudah dilakukan ini menjadi berkah," ucap Umi Sarah. (adv)



YUSVA ALAM

Gubernur dan Wagub Kaltim didampingi Wali Kota Bontang disambut upacara adat di Kelurahan Guntung.

Cara Isran Noor Tekan Angka Kemiskinan di Kaltim

BONTANG – Untuk menekan angka kemiskinan di Kaltim, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor menargetkan dibangun 3 ribu Rumah Layak Huni (RLH) atau sekitar 3 persen. Hal itu diungkapkannya saat peresmian dan penyerahan RLH CSR PT Pupuk Kaltim di Kelurahan Guntung beberapa waktu lalu.

Dalam pidatonya, Isran menjelaskan bahwa Kaltim ini kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Kaya akan migas, hutan, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya, namun sayangnya Kaltim masih memiliki orang miskin yang mencapai 0,63 persen.

“Seharusnya dengan kekayaan yang dimiliki tidak ada orang miskin.

Hal ini bertolak belakang,” ujarnya.

Ditambahkannya, dengan kekayaan SDA tersebut, Kaltim pun punya jasa besar untuk negeri ini. Kaltim termasuk salah satu penyumbang devisa terbesar di negeri ini.

Lantaran kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim pun mengeluarkan pergub guna menekan angka kemiskinan di Kaltim. Terbitnya Pergub Nomor 27 Tahun 2021 ini mengatur pelaksanaan program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pergub tersebut, penggunaan dana-dana CSR seluruh perusa-

haan di Kaltim untuk penyalurannya memfokuskan pada pembangunan RLH.

“Rakyat tidak butuh keuntungan dari perusahaan. Rakyat hanya butuh penyaluran dana CSR perusahaan untuk mengurangi angka kemiskinan,” serunya.

Dengan terbitnya pergub tersebut, ia berharap target RLH dapat tercapai. Bahkan saat dirinya sudah tidak menjabat, dapat diteruskan oleh gubernur-gubernur berikutnya.

Menurutnya, jikalau orang-orang miskin telah memiliki rumah yang layak, mereka akan dapat memperhatikan hal-hal lain seperti kesehatan atau kesejahteraan dirinya. (al)



SYAKURAH/RADARBONTANG.COM

Aksi damai di depan Mako Polres Bontang.

Aliansi Borneo Bersatu Tuntut Rocky Gerung Diproses Hukum

BONTANG - Aksi damai dilaksanakan oleh Aliansi Borneo Bersatu Kota Bontang pada Kamis (3/8/23) di depan Mako Polres Bontang. Aksi damai ini digelar terkait cacikan yang dilontarkan oleh salah satu pengamat politik, Rocky Gerung dalam salah satu sesi wawancaranya.

Bayu Sugara, Komandan Koppad Borneo distrik Bontang menjelaskan, bahwa cacian tersebut dikatakan terang-terangan untuk menghina Presiden Republik Indonesia, Jokowi terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dibangun di Kalimantan Timur.

"Mengkritik boleh mencaci maki jagan, kami mengecam keras terh-

adapernyataan Rocky Gerung yang secara terang terangan," ungkapnya.

Wakil Komandan Koppad Borneo distrik Bontang, Jerry Immanuel membeberkan 3 petisi yang digunakan untuk menuntut Rocky Gerung. Pertama, mengecam keras pernyataan Rocky Gerung yang secara terang-terangan menghina presiden RI yang merupakan simbol negara kesatuan.

Kedua, mengecam pernyataan Rocky Gerung yang dinilai memprovokasi masyarakat Indonesia, untuk menolak pembangunan dan perubahan IKN. Ketiga, permintaan kepada Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo beser-

ta jajarannya, untuk segera memproses hukum Rocky Gerung karena diduga telah menghina simbol negara dan memprovokasi masyarakat Indonesia "Hal ini berdampak terjadinya kegaduhan di tengah masyarakat Kalimantan dan Indonesia pada umumnya," tegasnya.

Aliansi Borneo Bersatu mendukung penuh institusi polri agar dapat mengamankan orang-orang yang memecah belah kesatuan Indonesia. "Kami warga Kalimantan membuka lebar kesempatan, agar Kalimantan bisa berkembang sehingga menjadikan wilayah Kalimantan menjadi maju," jelasnya. (sya)



Belum Tobat, Residivis Asal Loktuan Kembali Ditangkap

BONTANG – Satresnarkoba Polres Bontang kembali mengamankan seorang pria warga loktuan, Kamis (3/8/2023) pukul 10.00 wita. Pria berinisial Ju ditangkap lantaran diduga terlibat peredaran narkotika.

Parahnya lagi, Ju merupakan residivis kasus yang sama. Ju baru bebas pada 2021 lalu.

Pria 46 tahun tersebut ditangkap saat baru pulang dari rumahnya. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5 poket atau 1,73 gram di bawah tumpukan baju dalam lemari.

Selain itu Polisi juga menemukan lima plastik klip, alat hisap, dan dua buah pipet kaca di dekat kandang ayam.

“Pengakuan tersangka, sabu tersebut didapat dari pengedar sekitar Pasar Segiri Samarinda,” ungkap Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi



ISTIMEWA

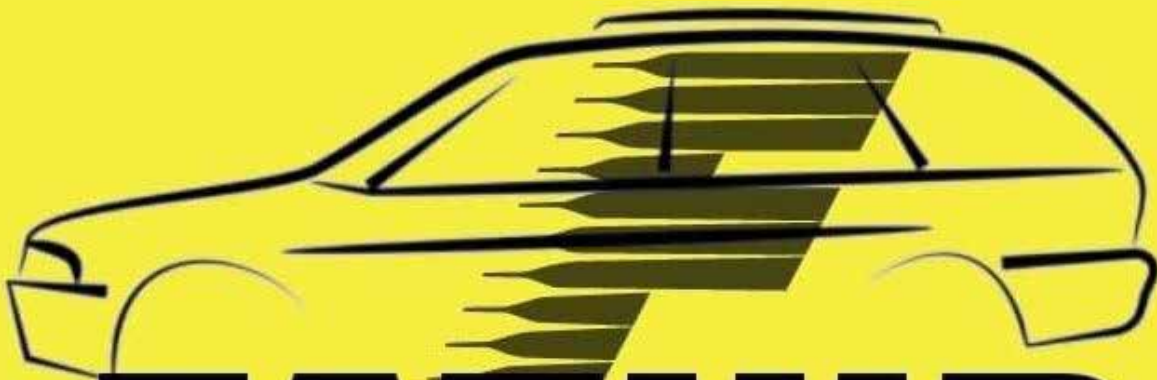
Ju beserta barang bukti sudah diamankan di Mako Polres Bontang.

Prastiya melalui Kasi Humas Iptu Mandiono.

“Sabu itu dibeli seharga Rp800 ribu “sebutnya

Kini tersangka telah ditahan di

Mapolres Bontang. Dia dijerat pasal 114 ayat (2) atau pasal 112 ayat (2) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Ancaman hukuman 20 tahun penjara,” pungkasnya. (hms)



FATHIR



fathir.bengkel



0823 5378 2691



fathir.bengkel



<https://goo.gl/maps/5aLXXQxfVqYcnSmr7>

**Bengkel &
Ganti Oli**

**Menerima
service
semua jenis
kendaraan**

Alamat : Jln. Kol. Syarifuddin Yoes No.126 Balikpapan Selatan

toko.radarmedia.id

MK·CO



MEDIA KALTIM GROUP

Adakah Korelasi Pengadaan Kendaraan Listrik dan Kesejahteraan Masyarakat?

Oleh: Hafsah (*Pemerhati Masalah Umat*)

PERKEMBANGAN zaman menuntut konsekuensi dari masyarakat, terutama sarana publik yang menjadi tolok ukur bagi kemajuan suatu negara.

Dari laman instagram diketahui, Wali Kota Bontang Basri Rase berencana melakukan pengadaan mobil listrik secara besar-besaran. Rencananya bukan hanya dilingkup pemerintahan saja, namun bakal diberlakukan bagi perusahaan seperti PT Badak LNG, PT Pupuk Kaltim, PT KPI dan IMM.

Hal ini menjadi langkah awal bagi Bontang, untuk perlahan transisi dari kendaraan konvensional berbasis bakar fosil menuju kendaraan listrik. Selain biaya perawatannya lebih murah, juga lebih ramah lingkungan dengan mengurangi emisi karbon

Pengadaan kendaraan listrik ini merupakan komitmen pihak pemkot guna menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022. Adapun Inpres itu berisi tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Untuk memastikan Inpres ini dapat secara efektif diimplementasikan di lingkungan instansi pemerintah, mekanismenya telah diberikan. Kendaraan dinas listrik bisa didapat melalui cara beli, sewa atau konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik berbasis baterai. (Kaltimtoday)

Tidak berhenti sampai di situ, dukungan regulasi lain juga disiapkan Pemerintah. Kementerian Keuangan tengah merevisi ketentuan atas pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang berlaku.

Perubahan ditujukan terhadap tarif PPnBM mobil listrik jenis battery electric vehicle (BEV) sebesar 0 persen, sementara mobil listrik hibrida atau hybrid electric vehicle (HEV) tarif pajaknya akan berkisar 5 persen hingga 7 persen.

Perbedaan tarif ini diharapkan dapat mendorong investasi mobil listrik yang lebih besar.

Wacana kebijakan lain yang tengah



mengemuka adalah rencana pemberian subsidi bagi pembelian kendaraan listrik baik roda empat atau roda dua.

Untuk mendukung rencana tersebut, maka Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Dalam peraturan tersebut dibahas mengenai stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan juga stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum untuk kendaraan bermotor listrik yang melingkupi charging station atau alat pengisi daya privat seperti pada showroom, perusahaan swasta, dan rumah tangga. (Bisnis.com)

Namun, rencana pengadaan kendaraan listrik khusus daerah Bontang, justru mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang. Menurutnya, kebijakan ini terlalu terburu-buru dan diambil tanpa melakukan perencanaan matang.

Pengadaan kendaraan listrik, mestinya dimulai dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya. (Kaltimtoday)

AROMA BISNIS PENGADAAN KENDARAAN LISTRIK

Berkembangnya tren kendaraan listrik di Indonesia saat ini menjadi peluang bisnis baru bagi semua pihak. Peluang bisnis ini tidak hanya terba-

tas di kota-kota besar saja, bahkan di daerah Asmat, Papua sendiri porsi penggunaan motor listrik bahkan mencapai 100%.

Berdasarkan roadmap yang disusun Kementerian ESDM, potensi jumlah kendaraan listrik di Indonesia pada 2030 mencapai 2,2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik dengan 31.859 unit SPKLU. Jumlah kendaraan listrik ini diharapkan bisa menekan impor BBM sekitar 6 juta kilo liter (kl) pada tahun tersebut.

Melihat peluang tersebut, PLN mengajak semua pihak untuk memanfaatkan ceruk bisnis ini. PLN akan menyediakan Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) milik PLN bagi badan usaha yang ingin bekerja sama, menyiapkan suplai listrik, serta dukungan aplikasi Charge.IN dalam pengelolaan SPKLU.

Sementara mitra dapat berperan sebagai penyedia fasilitas isi daya kendaraan listrik, penyedia lahan maupun properti, serta penyedia operasional dan pemeliharaan SPKLU. (CNBC Indonesia)

Tentu kita sepakat, bahwa ide turunan dari pusat tidak serta merta diterima tanpa melihat kondisi wilayah setempat. Bukan berarti menolak kemajuan dalam transportasi, namun lebih melihat sarana pendukung yang memadai, yakni infrastruktur jalan.

Jika melihat mekanisme yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat dengan menggaet pihak swasta dalam kerjasama melalui PLN, sangat terasa menyengat aroma bisnis mobil listrik ini.

Dunia kapitalis sangat kental dengan aroma cuan, sehingga wacana pengadaan kendaraan listrik menjadi ladang mengeruk keuntungan. Hal ini justru tidak berdampak bagi perubahan hidup sebagian besar masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah

Selain itu, kebutuhan primer masyarakat saat ini justru terjepit akibat naiknya harga sembako. Kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan pun masih menuai kritik, sehingga

tidak tepat jika saat ini pengadaan kendaraan listrik digenjut karena tidak berdampak samasekali dengan kesejahteraan hidup rakyat.

Belum lagi jalanan banyak yang rusak dengan berbagai faktor, sebagian akibat banjir yang sering melanda tapi permasalahan ini tak pernah tuntas diselesaikan. Ketimpangan akan terlihat akibat hanya sebagian jalur yang bisa dilalui oleh kendaraan listrik.

Mestinya perbaikan ekonomi rakyat lebih diprioritaskan dengan menyediakan lapangan kerja yang memadai, sehingga rakyat mampu mandiri secara ekonomi. Setelah itu, barulah melangkah memikirkan program pengadaan kendaraan listrik.

INFRASTRUKTUR DALAM PANDANGAN ISLAM

Sebelum memulai pembangunan infrastruktur, tentunya kebutuhan masyarakat yang sangat penting harus didahulukan, mulai dari sandang, pangan, papan dengan memastikan setiap kepala rumah tangga mempunyai penghasilan dari bekerja. Negara wa-

jib menyediakan lapangan pekerjaan karena hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap kepala rumah tangga.

Lalu kemudian negara akan memberikan layanan fasilitas umum dalam bentuk infrastruktur.

Infrastruktur dalam Islam akan diperhatikan pemerataannya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang urgen dan penting. Bahkan seorang wali/kepala wilayah tertentu dalam Islam yang seharusnya mengajukan dahulu kepada pemimpin atas pagajian pembangunan infrastruktur di wilayahnya, dibolehkan untuk melakukannya tanpa persetujuan seorang pemimpin kalau memang itu urgen dan penting.

Dana untuk pembangunan infrastruktur tidak ada niat agar bisa kembali modal atau sebagai investasi pemerintah seperti sekarang. Karena pemasukan negara yang berasal dari Baitul Mal sudah cukup banyak, tidak perlu utang atau menarik pajak setiap waktu. Sumber pemasukan tetap negara dalam Islam disimpan di Baitul Mal

yaitu dari fai, ghanimah, anfal, usyur, khumus, rikaz, zakat, jizyah, kharaj serta tambang.

Dalam kitab Nidzomul Iqtishadi fil Islam dijelaskan bahwa pengeluaran Baitul Mal ditetapkan sesuai kaidah tertentu ketika ada dan tidaknya kas di Baitul Mal, salah satunya yang berhubungan dengan pembelanjaan untuk kemaslahatan. Misal, pembuatan rumah sakit baru, yang sebenarnya sudah cukup dengan adanya rumah sakit yang lain.

Hak mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini ditentukan berdasarkan adanya harta, bukan pada saat tidak adanya. Apabila di dalam Baitul Mal terdapat harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Apabila di dalam Baitul Mal tidak terdapat harta, maka kewajiban tersebut gugur dari Baitul Mal. Kaum Muslimin juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini karena sejak awal pembiayaannya tidak wajib bagi kaum Muslim.

Wallahu a'lam bisshawab

**Kami Adalah
 Catering
 Terbaik Untuk
 Acara Kamu!**

Alamat
 Jalan Durian 1 No. 39
 Pisangan, Kel Gunung Elai
 Bontang-Kalimantan Timur

HUBUNGI KAMI : 0821 5810 0710 | 0812 5576 9885

Asyiknya Nongkrong Disini

•kopi inspirasi

MEDIA
KALTIM.com
Lebih Debat dengan Satu Kita

RADAR BONTANG
AKTUAL & TERPERCAYA .COM



1 EKOR AYAM PRESTO BAKAR

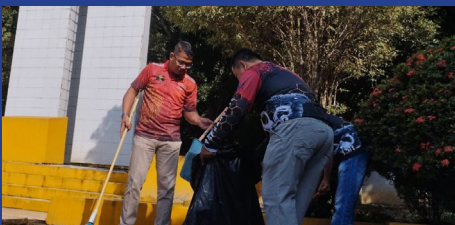
79K



Kompleks Ruko Halal Square, Blok D Rt 5 Nomor 9, Jl. Jend Achmad Yani,
Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim. CP: 0853-9217-5130



KALTIM PERINGKAT KE-2 PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI, BERAU MASUK 5 BESAR



**KERJA BAKTI, RUTAN TANJUNG REDEB
BERSIHKAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN WIJAYA KESUMA**



Rakor teknis P3DN se-Kaltim di Hotel Bumi Segah, Kamis (3/8/2023).

KALTIM PERINGKAT KE-2 PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI, BERAU MASUK 5 BESAR

TANJUNG REDEB - Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut Kalimantan Timur menduduki peringkat kedua sebagai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Indonesia, setelah Jakarta.

Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltim Isran Noor ketika membuka rapat koordinasi teknis P3DN se-Kaltim, di Hotel Bumi Segah, Kamis (3/8/2023).

Atas nama Pemprov Kaltim, dirinya berterima kasih kepada seluruh stakeholder terkait yang sudah berkomitmen dalam peningkatan pemakaian produk dalam negeri.

Namun menurut Isran, penilaian P3DN tersebut belum pas. Hal itu melihat kebutuhan pokok Kaltim paling pertama dan utama karena paling banyak menyuplai produk dalam negeri berupa batu bara, termasuk di Kabupaten Berau.

Walaupun batu bara dianggap belum green energi, tapi sampai sekarang belum ada yang bisa menghilangkan, menghapus, dan menghentikan penggunaan batu bara sebagai energi utama di Indonesia.

"Produk yang kita hasilkan

berguna bagi energi bangsa kita. Kaltim memiliki jasa besar terutama dalam memperoleh dan berkontribusi terhadap pendapatan negara," katanya, Kamis (3/8/2023).

Sementara itu, Ketua Harian P3DN Kaltim, Heni menambahkan, dalam rangka pelaksanaan barang dan jasa pemerintah menginstruksikan paling sedikit 40 persen untuk menggunakan produk UKM dalam negeri.

Untuk akselerasi dan optimalisasi P3DN di Kaltim sendiri, Pemprov Kaltim telah membentuk tim P3DN dan menindaklanjutinya dengan membuat instruksi Gubernur Kaltim tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri.

Adapun Provinsi Kaltim menempati posisi kedua nasional dalam P3DN dengan realisasi sebesar Rp 3,117 triliun. Setelah Jakarta dengan realisasi Rp 6,855 triliun. Begitu pula, Kabupaten Kutim, Kukar, Berau, Paser, Kota Samarinda dan Balikpapan juga termasuk dalam kategori 5 besar kabupaten dan kota penggunaan produk dalam negeri.

Pun untuk realisasi usaha menengah kecil koperasi Provinsi

Kaltim menempati posisi kedua nasional dengan nilai R 1,162 triliun. Serta Kota Samarinda, Balikpapan, Kabupaten Kukar dan Kubar juga menempati posisi 5 besar realisasi produk UMK dalam negeri.

Untuk itu komitmen nilai realisasi produk dalam negeri Provinsi Kaltim tahun 2023 sebesar Rp 6,9 triliun. Anggaran tersebut baru direalisasikan sebesar 61,52 persen.

"Jelas masih perlu peningkatan lagi karena target nasional sebesar 95 persen," sebutnya.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui katalog sejak 5 April 2021. Dengan jumlah etalase komoditas sebanyak 33 etalase.

Di samping itu Bupati Berau Sri Juniarsih menyambut baik kedatangan Gubernur Kaltim Isran Noor dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Berau. Yang mana diharapkan dapat meningkatkan semangat pihaknya dalam melaksanakan seluruh agenda pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Terutama dalam peningkatan pemakaian produk dalam negeri. (mnz)



KERJA BAKTI, RUTAN TANJUNG REDEB BERSIHKAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN WIJAYA KESUMA

TANJUNG REDEB - Dalam rangkaian hari ulang tahun Kemenkumham RI ke-78, Rutan Tanjung Redeb melaksanakan kerja bakti bersih-bersih di Taman Makam Pahlawan (TMP) Wijaya Kesuma, pada Kamis (3/8/2023).

Kepala Rutan Tanjung Redeb, Puang Dirham mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada para pendahulu bangsa dan meningkatkan rasa nasionalisme jajaran Petugas Rutan Tanjung Redeb sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mengayomi masyarakat yang berada di dalam Rutan Tanjung Redeb.

"Saya berharap hal ini meningkatkan kesadaran jajaran Rutan Tanjung Redeb sebagai ASN Kemenkumham," Ucap Kepala

Rutan, Puang Dirham.

Disamping itu, Kepala Rutan Tanjung Redeb juga menerangkan, dengan kegiatan kebersihan tersebut dapat menumbuhkan sikap peduli dari petugas Rutan Tanjung Redeb terhadap kondisi kebersihan.

"Sebagai ASN harus memberi contoh, salah satunya kepedulian untuk menjaga kebersihan area," Ucapnya.

"Hal ini diharapkan dapat menanamkan rasa kecintaan terhadap lingkungan sekitar, sehingga sesuai cita-cita para leluhur bangsa, kita dapat membangun bangsa sesuai dengan harapan pada pendahulu," Lanjut Kepala Rutan, Puang Dirham.

Giat Bersih-bersih TMP Wijaya Kesuma oleh petugas Rutan Tanjung Redeb ini juga diikuti oleh jajaran dari petugas Imigrasi Tanjung Redeb. (dez)



Perumda Air Minum Batiwakkal saat inspeksi lapangan ke rumah pelanggan. (Ist)

PASOKAN AIR DI BERAU RELATIF STABIL, MESKI CUACA PANAS EKSTREM

TANJUNG REDEB - Beberapa daerah memasuki peningkatan suhu udara. Bahkan Berau menduduki posisi kedua dengan suhu terpanas. Namun hal itu tidak memengaruhi pasokan air bagi masyarakat di Kabupaten Berau.

Menurut Direktur Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Batiwakkal, Saipul Rahman, pasokan air di Kabupaten Berau masih relatif stabil. Memang diakuinya, ada indikasi penurunan muka air sungai yang lebih rendah dari biasanya meski sekarang sedang purnama.

"Tapi kami sudah mencoba mengatasinya dengan pengerukan di dekat pipa intake," bebernya, Kamis (3/8/2023).

Dijelaskannya, jika dilihat dari sisi peng-

gunaan bahan kimia sebenarnya justru lebih efisien. Lantaran, air baku relatif rendah tingkat kekeruhan airnya atau Nephelometric Turbidity Unit (NTU).

Hal lain yang dikhawatirkan adalah intrusi air laut. Intrusi tersebut merupakan terobosan batuan beku yang telah menjadi kristal dari suatu sistem magma di bawah permukaan bumi.

Jika intrusi air laut tersebut berwarna hijau, akan membuat pihaknya sedikit kesulitan mengendalikannya karena sifatnya menyeluruh.

"Tapi semoga itu tidak terjadi. Kalau pun terjadi maka kita perlu lakukan produksi bergilir dan manajemen distribusi air kepada pelanggan," tandasnya. **(Mnz)**



SP NABAN BERSATU PERTAMINA GELAR AKSI DEMO DI GEDUNG DPRD



**DPRD BALIKPAPAN DUKUNG PEMKOT
SOAL PENAMBAHAN PPPK**



Warga terdampak galian C ilegal eks Hotel Tirta usai membuat laporan polisi (LP) di Polda Kaltim.

BABAK BARU KASUS GALIAN C ILEGAL DI EKS HOTEL TIRTA, LP MASUK DI POLDA KALTIM

BALIKPAPAN - Kasus Galian C ilegal di eks Hotel Tirta, Balikpapan Tengah saat ini memasuki babak baru, setelah 8 bulan berstatus sebagai delik aduan di Polda Kaltim, kini sudah menjadi laporan polisi (LP) setelah salah seorang warga terdampak membuat laporan polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kaltim, Kamis (3/8/2023).

Perwakilan warga, Nizar Firdaus mengatakan, setidaknya ada 4 pihak yang dilaporkan dalam kasus ini. Mereka adalah pemilik lahan, pekerja, pemilik alat dan pengawas.

"Sebelumnya kami sudah menyampaikan aduan atas Galian C di eks Hotel Tirta, polisi lalu melakukan gelar perkara dan meminta kami membuat laporan polisi sekarang," ujarnya.

Nizar menjelaskan, laporan yang disampaikan warga ini bisa segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. Sebab, kasus ini sudah cukup lama menggantung.

"Kami serahkan proses hukumnya kepada kepolisian. Karena kami sudah konfirmasi ke Pemkot Balikpapan Galian C ini memang tidak berizin," jelasnya.

Keberadaan Galian C yang diduga kuat ilegal tersebut sebelumnya diadukan warga kepada Polda Kaltim pada pertengahan Desember 2022 lalu. Selain diduga ilegal, aktifitas Galian C tersebut dikatakan warga, telah membuat lahan milik warga tergerus hingga rusak parah.

"Kepada para terlapor disematkan Pasal 158 UU MINERBA dan Pasal 98 Tentang Lingkungan Hidup," tutup Nizar. **(Bom)**



Pertemuan antara SP Naban Bersatu Pertamina dengan Komisi IV DPRD Kota Balikpapan

Komisi IV DPRD Fasilitas Mediasi SP Naban Bersatu Pertamina dengan Pertamina RU-V Balikpapan

BALIKPAPAN - Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Tenaga Bantuan (SP Naban) Bersatu Pertamina mendatangi kantor DPRD Kota Balikpapan untuk mengadu perihal tuntutan kenaikan upah tenaga ahli daya pekerja Pertamina RU-V, Kamis (3/8/2023).

Usai melakukan orasi, perwakilan dari SP Naban Bersatu diterima oleh Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, dan melakukan audiensi dengan Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Doris Eko Rian Desyanto.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Doris Eko mengatakan, hasil dari pertemuan ini setidaknya ada kebijakan dari pihak perusahaan yakni Pertamina RU-V Balikpapan yang akan melaksanakan pertemuan den-

gan pimpinan di Jakarta, entah itu SP Naban Bersatu diajak atau mereka yang datang ke Kota Balikpapan.

"Rekomendasi kita agar segera dilakukan pertemuan. Kami dari Komisi IV dan Disnaker tidak bisa menindak," ujar Doris.

Doris menjelaskan, untuk upah para pekerja sudah diatas UMK, hanya saja berharap ada kenaikan sebesar Rp 205 ribu. Hal ini hanya masalah internal perusahaan dan pegawai. "Kita siap memfasilitasi jika ada pertemuan lagi," jelasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan keterangan Ketua SP Naban Bersatu Pertamina, Rudi Hartono mengatakan, saat ini yang diberikan pihak Pertamina RU-V hanya Rp 170 ribu, namun pekerja meminta ada kenaikan sebesar Rp 205 ribu seper-

ti UMK tahun 2023 ini.

"Masa kenaikan Rp 37 ribu tidak bisa, mereka perusahaan besar dan kami ini tenaga ahli daya," ujar Rudi. Dimana didalamnya terbagi dari golongan I hingga golongan VII, dan paling rendah UMK Balikpapan sebesar Rp 3,2 juta. "Harusnya sesuai dengan kebijakan Migas, yang mana penuh risiko. Masa digaji sama dengan perusahaan diluar Migas," tegasnya.

Rudi menambahkan, untuk saat ini rata-rata pekerja hanya menerima upah sebesar Rp 3-4 juta. "Kita kasih waktu satu bulan ini harus ada pertemuan, mau itu dipusat atau disini. Silahkan KPI pusat hadir kesini, DPRD, Disnaker, yang penting tuntutan ini ada realisasinya demi konduktivitas Kota Balikpapan," paprnya (**ADV/DPRDBalikpapan/Bom**)



Aksi demo dari SP Naban Bersatu Pertamina di gedung DPRD Kota Balikpapan.

SP NABAN BERSATU PERTAMINA GELAR AKSI DEMO DI GEDUNG DPRD

BALIKPAPAN - Ratusan masa yang tergabung dalam Serikat Pekerja Tenaga Bantuan (SP Naban) Bersatu Pertamina RU V Balikpapan mendatangi kantor DPRD Kota Balikpapan untuk menyampaikan aspirasinya perihal tuntutan kenaikan upah dari tenaga kerja alih daya, Kamis (3/8/2023).

Ketua SP Naban Bersatu, Rudi Hartono mengatakan, aksi mendatangi kantor DPRD Kota Balikpapan ini untuk mengadukan kenaikan upah para pekerja tenaga alih daya agar disesuaikan dengan kenaikan UMK Kota Balikpapan.

"Tuntutan kita masih sama, yakni kenaikan upah agar disesuaikan dengan kenaikan UMK Kota Balikpapan," ujarnya.

Lebih lanjut Rudi menjelaskan, masa aksi juga melakukan orasi dan membentangkan sejumlah poster yang bertuliskan "Kenaikan UMK tahun 2023 Kota Balikpapan Rp 205.000 harga mati, berlaku juga di tenaga alih daya (TAD) Pertamina RU V Balikpapan".

Usai menyampaikan orasinya, sejumlah perwakilan massa aksi pun dibawa masuk

kedalam ruang paripurna DPRD Balikpapan untuk dilakukan audiensi dengan pihak Pertamina dan DPRD Kota Balikpapan.

Debat alot pun sempat terjadi didalam ruang paripurna, massa aksi bersikeras menuntut kenaikan upah diberlakukan sama jumlahnya dengan UMK Balikpapan.

Rudi mengatakan, selama puluhan tahun menjadi pekerja, rata-rata upah yang diterima para pekerja tenaga alih daya tak kurang dari Rp 4 juta. Nilai itu dinilai tak sebanding dengan resiko kerja yang hanya di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ditambah lagi kenaikan upah pada tahun 2023 dibawah dari kenaikan upah UMK Balikpapan yakni kurang lebih sebesar Rp 170 ribu.

Hampir satu jam melakukan audiensi, para pekerja, pihak Pertamina dan DPRD Balikpapan pun sepakat untuk dilakukan pertemuan dengan pengambil kebijakan yakni Direktur ESDM PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Pusat sebulan kedepan.

"Kalau pun nanti tidak ada kelanjutan kami akan bawa massa yang lebih besar," tutup Rudi. **(Bom)**



Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono

DPRD BALIKPAPAN DUKUNG PEMKOT SOAL PENAMBAHAN PPPK

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan tengah mengajukan penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebanyak 1.413 orang. Dan hal ini pun dirispon positif DPRD Kota Balikpapan.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengatakan, dirinya mengaku sangat setuju atas rencana Pemkot melakukan penambahan formasi PPPK tersebut, terlebih keberadaan PPPK bisa sangat membantu kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami setuju terkait penambahan formasi PPPK. Paling tidak mereka yang lama telah bekerja sebagai honorer bisa diangkat statusnya menjadi PPPK," ujarnya, Rabu (2/8/2023).

Lebih lanjut Budiono menjelaskan, ke-

beradaan PPPK ini juga dianggap perlu lantaran untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah sangat jarang dibuka terlebih saat ini juga banyak PNS yang pensiun.

"Akhirnya untuk mengisi kekosongan ini diangkatlah tenaga honorer. Nah, tenaga honorer inilah nantinya diangkat menjadi PPPK demi meningkatkan kesejahteraan mereka," jelasnya.

Menurut Budiono, tidak ada masalah jika penggajiannya atau pembayaran tenaga PPPK dibebankan oleh APBD. Karena tak bisa dipungkiri tenaga honorer atau PPPK ini masih sangat dibutuhkan. Tinggal nanti masing-masing OPD yang melakukan seleksi.

"Bisa saja melalui APBD kan soal gajihnya. Nanti diserahkan ke masing-masing OPD yang ada aja," tutupnya. **(ADV/DPRD-Balikpapan/Bom)**



Aksi potong hewan babi oleh masyarakat dayak di Kota Balikpapan yang diberi inisial dan foto RG

UNJUK RASA WARGA DAYAK DI KALTIM DIWARNAI AKSI POTONG BABI BERINSIAL RG

BALIKPAPAN - Ratusan warga Balikpapan, Kaltim yang tergabung dalam Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur Kalimantan Utara (LPADKT-KU) dan Gerakan Putera Asli Kalimantan (Gepak Kuning), kembali melakukan aksi unjukrasa menuntut kepolisian untuk menangkap, mengadili dan memenjarakan Rocky Gerung atas dugaan ujaran kebencian yang dilakukannya terhadap symbol negara, yakni Presiden RI Joko Widodo, Rabu (2/8/2023).

Aksi kali ini selain melakukan pembakaran foto Rocky Gerung, juga memotong hewan babi dengan mandau Dayak yang sebelumnya sudah ditulis dengan inisial RG dan dipasang pula foto RG di muka hewan tersebut. Bahkan salah seorang pengunjuk rasa langsung meminum darah segar dari pemotongan babi tersebut.

Ketua DPC LPDKT-KU Balikpapan, Nasion Lasung mengatakan, bahwa pernyataan Rocky Gerung yang ramai di media sosial tersebut menjatuhkan citra kepala negara.

"Pelaporan ini menjadi simbol

sakit hati masyarakat Indonesia, terutama warga Kaltim, terhadap Rocky Gerung," ujarnya.

Nasion menjelaskan, Presiden Joko Widodo sudah secara resmi menunjuk Kabupaten PPU, Kaltim sebagai lokasi baru Ibu Kota Negara, sehingga pernyataan Rocky Gerung yang tidak pantas tersebut sudah menjatuhkan nama baik Presiden.

"Kami minta agar kepolisian bisa menjerat Rocky Gerung dengan proses hukum yang berlaku," jelasnya.

"Sebagaimana tertuang dalam Pasal 218 ayat (1) KUHP, di mana pelakunya dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan," tambahnya.

Sementara itu Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf mengatakan, sampai saat ini Polda Kaltim sudah menerima sedikitnya 4 laporan polisi yang masuk ke Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan terkait ujaran RG terhadap Presiden.

"Jadi laporan tersebut tujuannya sama, yakni memproses secara hukum perihal penyampaian RG," ujarnya.

Ditambahkan, Yusuf meski

ujaran yang dilakukan RG tidak di wilayah hukum Polda Kaltim, namun pihaknya tetap menerima laporan masyarakat yang masuk tersebut.

"Laporan yang masuk ini kami terima dulu, kemudian kami proses awal penyidikan dan melengkapi administrasi penyidikan jika dimungkinkan," jelasnya.

Yusuf menambahkan, kemungkinan juga ada laporan dari Polres jajaran di ke wilayah untuk sementara waktu, pihaknya juga masih menginventarisir laporan yang masuk tersebut.

Dalam kesempatan itu, Yusuf menegaskan Polda Kaltim mengapresiasi kegiatan aksi unjukrasa yang dilakukan sejumlah ormas di Kaltim yang berjalan secara aman dan kondusif.

"Kita apresiasi pelaksanaan aksi berjalan aman dan kondusif, sejauh ini," tegasnya.

Untuk pengamanan sendiri, Polda Kaltim lebih mengedepankan dengan cara yang humanis dan persuasif.

"Mereka melakukan kegiatan ini untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib dan cukup baik," tutupnya. **(bom)**



Rekaman CCTV para anak-anak, termasuk pelaku berlarian usai melempar korban berusia 10 tahun ke bendali.

GARA-GARA MENGEJEK, BOCAH 10 TAHUN DICEBURKAN KE BENDALI OLEH ORANG TAK DIKENAL

BALIKPAPAN - Ramai beredar di sosial media (Medsos) rekaman CCTV yang memperlihatkan sejumlah anak-anak menceburkan seorang temannya yang berusia 10 tahun ke dalam sebuah Bendungan Pengendali Air (Bendali) di kawasan Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan pada Minggu (30/7/2023) lalu.

Atas kejadian tersebut, orangtua korban yang enggan disebut nama dan identitasnya langsung membuat laporan ke Polresta Balikpapan. Meski sang anak disebutnya selamat dan tidak mengalami luka serius.

"Sudah saya laporkan kejadian itu ke PPA Polresta Balikpapan," ujarnya. Sementara itu dikonfirmasi, Kasatreskrim Polresta Balikpapan, Kompol Ricky Sibarani melalui Kanit PPA Polresta Balikpapan, Ipda Iskandar Ilham mengatakan, jika korban dan pelaku tidak saling kenal.

Sebelum kejadian, korban dan

seorang temannya menghampiri sekelompok remaja yang sedang memancing di bibir bendali. Korban pun kemudian langsung menceburkan diri dan berenang-renang di sekitar lokasi kail pancing.

"Terduga pelaku ini sempat menegur supaya menghindar. Namun korban justru mengejek pelaku dengan kata-kata yang nggak pantas. Diucapkan ke arah kawan remaja itu," ujar Iskandar, Rabu (2/8/2023).

Lanjut Iskandar, sehingga dua orang terduga pelaku pun bereaksi dengan mendatangi korban. Masing-masing terduga pelaku berinisial MF (17) dan PY (18). Di mana MF memegang kaki, PY memegang bagian tangan. Korban diayun dan lantas dibuang ke bendali hingga tercebur kembali.

Seusai aksi itu, kedua terduga pelaku bersama kawan-kawannya pun menertawai korban dan lan-

tas beranjak meninggalkan lokasi.

"Beruntung saat itu air sedang surut. Mungkin ketinggian hanya sekitar 40 centimeter lah. Jadi Alhamdulillah korban tidak kenapa-kenapa," jelasnya.

Hingga saat ini kedua terduga pelaku pun dalam pengawasan kepolisian sebelum proses hukum yang berlaku. Dan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Nantinya, akan ditentukan apakah akan berlanjut ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka.

Sementara si korban tengah menjalani rangkaian pemeriksaan kejiwaan, apakah mengalami trauma atau tidak. Sekalipun secara kasat mata, menurut Iskandar, korban tampak biasa dan bahkan cenderung aktif.

"Mungkin besok kita akan melakukan gelar perkara, tetapi untuk sementara anaknya ini masih dalam pengawasan kami," tutup Iskandar. **(bom)**



ALIANSI ORMAS PASER AKSI DI DEPAN POLRES



**SOAL KASUS GURU CABUL, ORANG TUA KORBAN
MINTA KETERBUKAAN INFORMASI POLISI**



Protes masyarakat atas pernyataan kontroversi Rocky Gerung

ALIANSI ORMAS PASER AKSI DI DEPAN POLRES

PASER - Buntut pernyataan kontroversi Rocky Gerung yang dinilai menghina Jokowi, mendapat kecaman. Salah satunya datang dari massa yang tergabung dalam Aliansi Ormas Paser. Selain membakar ban di depan Polres Paser, massa juga menyuarakan empat tuntutan terhadap pernyataan pengamat politik itu.

Yakni mengenai pernyataan Rocky Gerung yang dianggap telah memprovokasi masyarakat untuk tidak melanjutkan pembangunan IKN di Pulau Borneo. Mengecam keras pernyataan Rocky Gerung yang telah menghina presiden, kemudian meminta kepada Kapolri agar diproses secara hukum.

Serta menyatakan sikap bahwa mendukung secara penuh atas pembangunan IKN. Ketua DPC Gepak Paser, Saprani mengatakan apa yang telah disampaikan terhadap Rocky Gerung, meminta agar pihak yang berwajib segera menindaklanjuti dan diproses secara hukum berdasarkan Undang-undang.

"Kami akan mengawal terus persoalan ini, bila tidak ditindaklanjuti bakal ada aksi lanjutan dengan massa yang lebih banyak," kata Saprani ditengah aksi, Kamis (3/8/2023).

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum atas pernyataan dari Rocky Gerung. Diharapkannya tuntutan dan pelaporan kepolisian yang dilakukan dapat ditindaklanjuti

hingga ke Mabes Polri.

Wakapolres Paser, Kompol Donny Dwija Romansa menuturkan telah menerima pernyataan sikap yang kemudian akan ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada pimpinan.

"Kami akan sampaikan ini (pernyataan sikap Aliansi Ormas Paser) dan akan dikoordinasikan, terkait tindak lanjutnya ini nanti menjadi bahan kami. Karena saya lihat dari beberapa daerah ada (aksi penyampaian pendapat) dan tidak hanya di Paser saja" tutur AKP Donny.

Adapun gerakan aksi yang tergabung dalam Aliansi Ormas Paser ini terdiri dari Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak), Pasak bakudapati Paser, dan TBBR Paser. **(bs)**



SOAL KASUS GURU CABUL, ORANG TUA KORBAN MINTA KETERBUKAAN INFORMASI POLISI

PASER - Kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Paser kembali terjadi. Uniknya, korban kali ini merupakan anak laki-laki yang bersekolah di salah satu Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Long Ikis.

Sementara pelaku merupakan gurunya sendiri, yang juga merupakan seorang laki-laki. Diduga perbuatan yang menyimpang itu terjadi pada 19 Mei 2023 lalu sekitar pukul 11.00 WITA, saat jam sekolah sedang berlangsung.

Hal itu didapati berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/47/V/2023/SPKT.Reskrim/Polres Paser/Polda Kalimantan Timur, tanggal 22 Mei 2023. Pihak orang tua korban menyampaikan hal ini, lantaran tak mendapat keadilan atas perbuatan pelaku.

Orang tua korban menginginkan keterbukaan informasi

oleh pihak kepolisian terhadap kasus pencabulan yang menimpa anaknya. "Saya mau kepastian informasi bahwa pelaku sudah ditahan atau belum, soal sidangnya kapan juga saya tidak pernah dikabari," kata orang tua korban.

Ia mengaku, kondisi anaknya saat ini sudah mulai membuka diri dengan orang lain yang dulunya beberapa bulan lalu sempat mengalami trauma. "Sudah mulai mau berteman, anak saya sempat mengurung diri di rumah lumayan lama," ungkapnya.

Diakui, keluarga pelaku sempat mendatangi keluarga korban dengan maksud untuk meminta maaf terhadap yang dilakukan oleh pelaku. Ibu korban mengaku memaafkan pelaku, dengan catatan proses hukum tetap dilanjutkan.

"Dari awal sudah saya maafkan, cuman kalau kasus harus tetap

berjalan. Saya juga komplain pimpinan sekolah anak saya yang baru ini datang ke sini (rumah), dari bahasanya itu jadi penengah, sementara kejadiannya di sekolah yang lama, itu yang tidak cocok," tambahnya.

Ia menginginkan, oknum guru tersebut harus ditahan agar tidak ada korban lagi seperti yang dialami oleh anaknya. "Jangan sampai ada korban-korban lagi, kalau bisa jangan sampai kerja di sekolah-sekolah karena sekolah ini dekat dengan anak-anak, intinya harus ditahan," tutupnya.

Berdasarkan hasil laporan kepolisian, peristiwa itu terjadi saat korban dipanggil oleh pelaku untuk memperbaiki kabel di ruang kelas. Setelah masuk ke ruangan, pelaku kemudian menutup kelas dan melakukan tindakan tak senonoh dengan mencium korban berulang kali. **(bs)**